

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.P. *Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, Mandar Maju, Medan, 1983.
- Abintoro Prakoso. *Penemuan Hukum Sistem Metode, Aliran dan Prosedur menemukan Hukum*, Laksbang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Achmad Ali. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta, 2002
- B.F. Sihombing, *Sistem Hukum PPAT dalam Hukum Tanah Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2019
- Bahder Johan Nasution. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Basah Sjachran. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Budi Harsono, *Undang-undang Pokok Agraria; Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya – Bagian Pertama Jilid Kedua*, Djambatan, Jakarta, 1971
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa Edisi Keempat, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2015
- Dominikus Rato. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2010.
- Dr. Hatta Isnaini Wahyu Utomo, S.H., M.Kn., *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta, 2020
- E Sumaryono. *Etika Hukum Relevansi Teori Hukum Thomas Aquinas*, Kanisius, Yogyakarta. 2002.
- Effendi Peranginangin. *Hukum Agraria Di Indonesia, Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, 2007.
- Habib Adjie. *Makalah Fragmentasi Soal dan Solusi Notaris/PPAT Tentang Perubahan isi akta, Jika Terjadi Kesalahan Tulis dan Ketik*, Mandar Maju, Bandung, 2010.

- Hans Kelsen. (Alih Bahasa oleh Somardi), *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif- Empirik*, Jakarta, BEE Media Indonesia, 2007
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo, *Memahami Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*, Kencana, Jakarta, 2020
- Herlien Budiono, *Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapannya dibidang kenotariatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006,
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016
- Peter Mahmud Marzuki. *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010.
- R. Subekti, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- _____, *Hukum Pembuktian*, PT. Pradnya Paramitha, Jakarta, 2005
- Riduan Syahrani. *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999.
- Ridwan H R. *Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2003.
- Roscoe Pound. *Pengantar Filsafat Hukum*, diterjemahkan dari edisi yang diperluas oleh Drs. Mohammmad Radjab, Jakarta, Bhartara Karya Aksara, 1982.
- S Chandra. *Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan di Kantor Pertanahan*, Gresindo, Jakarta, 2005.
- Salim H.S. *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*. Rajawalil Pers, Jakarta, 2015,
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2007

Urip Santoso. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2011.

_____, *Pejabat Pembuat Akta Tanah Perspektif Regulasi, Wewenang, dan sifat Akta*, Kencana, 2016

B. Tesis/Jurnal/Internet

Dedy Pramono, Kekuatan Pembuktian Akta Yang Dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia, *Lex Jurnalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015

Hatta Isnaini Wahyu Utomo, Dan Hendry Dwicahyo Wanda, Prinsip Kehatian Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam Peralihan Tanah yang Belum Bersertifikat, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* NO. 3 VOL. 24 JULI 2017

Irfan Iryadi, Kedudukan Akta Otentik dalam Hubungannya dengan Hak Konstitusional Warga Negara, *Jurnal Konstitusi*, Volume 15, Nomor 4, Desember 2018

Ivan Ari (2019). Perbedaan Prinsip antara Permohonan dengan Gugatan. Melalui <http://p4tkpenjasbk.kemdikbud.go.id/kepegawaian/2019/05/15/perbedaan-prinsip-antara-permohonan-dengan-gugatan/>, diakses Tanggal 13 Oktober 2021

Muhammad Idris, Minat Jadi Camat? Ini Besaran Gajinya. Melalui [https://money.kompas.com/read/2020/08/04/125101526/minat-jadi-camat-ini-besaran-gajinya?page=](https://money.kompas.com/read/2020/08/04/125101526/minat-jadi-camat-ini-besaran-gajinya?page=all) all, diakses Tanggal, 24 Oktober 2021

Nelly Juwita, Kesalahan Ketik Dalam Minuta Akta Notaris Yang Salinannya Telah Dikeluarkan, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Magister Kenotariatan*, Fakultas Hukum Universitas Surabaya Vol.II.No.II Tahun 2013

Pengadilan Negeri Karanganyar, Prosedur Pendaftaran Permohonan. Melalui <https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/81-prosedur-perkara-perdata/918-prosedur-pendaftaran-permohonan>, Akses Tanggal : 14 Oktober 2021

Purna Noor Aditama, Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Pada Peralihan

Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli, Jurnal Lex Renaissance No. 1
Vol. 3 Januari 2018.

Siska Adriani, Pertanggungjawaban Hukum Notaris Dalam Perubahan Minuta Akta, Jurnal Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Andalas, 2014

Sofia hasanah, Arti Asas *Ius Curia Novit*. Melalui <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58dca7c78ab7d/arti-asas-ius-curia-novit-i/>, Akses Tanggal, 13 Oktober 2021

Syafriani Yanti, Konsekuensi Yuridis Minuta Akta Yang Tidak Dimiliki Notaris Dalam Pembuatan Salinan Akta, Tesis Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

C. Perundang – Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2001 Tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 Tentang Peraturan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Ujian, Magang, Pengangkatan Dan Perpanjangan Masa Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.